



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Amich Alhumami
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
3. NHK : 401661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
3. Tanah Seluas 8860 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	51.000.000
1. MOBIL, Nissan Grand Livina XV AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, Honda NF 125 SD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.656.745.466
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.407.745.466
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.407.745.466

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.